

Kesetaraan Gender Peladang Sayur Dalam Distribusi Kerja Bagi Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Magelang

Fenti Erdiana Efendi, Rini Fidiyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: fentierdiana@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi kerja peladang sayur di Kabupaten Magelang dalam perspektif kesetaraan gender serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan pembagian kerja yang seimbang diantara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap peladang laki-laki dan perempuan. Dalam pengumpulan data, ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam seluruh tahapan aktivitas pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, panen, hingga pemasaran. Namun, peran mereka masih sering diposisikan sebagai “bantuan” dan belum diakui secara formal sebagai bagian dari kerja produktif. Ketimpangan ini diperkuat oleh terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya seperti pelatihan, modal, kepemilikan lahan, serta pengambilan keputusan. Selain itu, beban kerja ganda yang ditanggung Perempuan yakni pekerjaan domestik dan produktif, merupakan hambatan utama dalam mewujudkan kesetaraan. Meski demikian,

rumah tangga petani yang menerapkan pola kerja kolaboratif menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan partisipasi yang lebih inklusif. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi struktural berupa peningkatan kapasitas perempuan, penyediaan akses terhadap sumber daya produktif, serta penguatan peran perempuan dalam kelembagaan lokal. Melalui pendekatan yang responsif gender, distribusi kerja yang adil dan setara di sektor pertanian tidak hanya memungkinkan peningkatan produktivitas, tetapi juga mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga dan keadilan sosial secara berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Kata kunci: distribusi kerja, kesetaraan gender, peladang sayur, kesejahteraan keluarga.

PENDAHULUAN

Indonesia Bidang pertanian masih menjadi sumber penghasil utama bagi mayoritas penduduk Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 29% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto di beberapa daerah³⁷⁹. Rumah tangga pertanian menjadi tulang punggung perekonomian desa, termasuk di Kabupaten Magelang. Perkembangan sektor ini tidak hanya menopang kebutuhan pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan³⁸⁰.

Salah satu subsektor penting yang mendukung kehidupan rumah tangga di Kabupaten Magelang adalah pertanian

³⁷⁹ BPS (2023). Statistik Pertanian Indonesia.

³⁸⁰ Natali Weka et al, (2023) "Peran Usaha Tani Sayur Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Wilayah Patisomba Kelurahan Wuring Kabupaten Sikka," *Journal of Agricultural and Farming* 1, no. 1, 11.

hortikultura, khususnya sayuran. Aktivitas berladang sayur menjadi sumber penghasilan utama yang menunjang kebutuhan dasar keluarga, terlebih karena didukung oleh iklim dan kondisi geografis yang mendukung aktivitas bercocok tanam. Selain itu, subsektor ini memiliki nilai jual tinggi serta dapat menyerap penggarap dalam jumlah yang besar.

Dalam praktiknya, kegiatan meladang sayur bukan hanya dilakukan oleh laki-laki. Banyak perempuan juga terlibat aktif dalam seluruh proses pertanian. Mereka tidak hanya terbatas pada pekerjaan domestik seperti memasak, merawat anak, dan mengurus rumah, tetapi juga mengambil peran penting dalam sektor informal yang berkontribusi langsung pada penghasilan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Moser, yang membagi peran perempuan ke dalam tiga kategori kerja: reproduktif, produktif, dan komunitas, di mana ketiganya sering kali dijalani secara bersamaan oleh perempuan di pedesaan³⁸¹. Keterlibatan perempuan dalam pertanian menjadi bagian dari strategi bertahan hidup keluarga, mengingat tidak semua rumah tangga bisa bergantung sepenuhnya pada penghasilan kepala keluarga laki-laki³⁸².

Meskipun peran perempuan sangat besar, kenyataannya masih terjadi ketimpangan gender dalam distribusi kerja dan pengakuan terhadap kontribusi mereka. Data dari FAO menunjukkan bahwa meskipun perempuan menyumbang sekitar 43% tenaga kerja pertanian di negara berkembang, mereka masih memiliki akses yang jauh lebih rendah terhadap lahan, kredit, pelatihan, dan teknologi³⁸³.

³⁸¹ Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*.

³⁸² Yuliana, (2022), "Perempuan Peladang Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga Di Desa Samba Bakumpai," *Journal Sosiologi* 5, no. 1, 38.

³⁸³ FAO (2011). *The State of Food and Agriculture: Women in Agriculture. Closing the Gender Gap for Development*.

Perempuan seringkali memiliki beban ganda, yaitu tanggung jawab domestik dan produktif, tanpa memperoleh akses dan kontrol yang setara terhadap sumber daya seperti lahan pertanian, modal, dan subsidi.

Perempuan juga jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, baik di tingkat keluarga maupun komunitas, yang menyebabkan perempuan cenderung berada dalam posisi marginal meskipun kontribusinya sangat signifikan. Ketimpangan ini menyebabkan status sosial perempuan dalam keluarga dan masyarakat cenderung lebih rendah, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga³⁸⁴.

Kesetaraan gender dalam konteks distribusi kerja mengacu pada pemberian peluang dan hak yang setara bagi pria dan wanita di semua bidang kehidupan, termasuk dalam hal keterlibatan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, serta pembagian tugas yang adil. Studi oleh World Bank menunjukkan bahwa apabila perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya produktif, maka hasil produksi pertanian dapat meningkat hingga 20–30%, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan³⁸⁵. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarga dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam mendukung kesejahteraan bersama. Kesetaraan gender juga berarti penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan struktural yang menghambat perempuan dan laki-laki untuk berkembang secara adil³⁸⁶.

³⁸⁴ Fitri Suminar Megantara and Nuraini W Prasadjo, (2021), "Analisis Gender Pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Agroforestri (Kasus: Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Tengah)," *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 5, no. 4, 578.

³⁸⁵ World Bank (2012). *World Development Report: Gender Equality and Development*.

³⁸⁶ Ivana Septia Maharani et al, (2024), "Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

A. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender sering kali mengalami kesalahpahaman di masyarakat, salah satunya adalah penyamaan konsep gender dengan jenis kelamin biologis, atau anggapan bahwa isu gender hanya berkaitan dengan perempuan. Padahal, gender merupakan suatu konstruksi sosial dan budaya yang mengatur peran serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kumpulan masyarakat, dan bersifat dinamis seiring dengan perkembangan sosial dan budaya³⁸⁷.

Berkembang di masyarakat beragam stereotype mengenai perempuan dan laki-laki, misalnya seperti laki-laki lebih kuat, rasional, dan tegas sedangkan perempuan lebih lemah, emosional, dan pasif. Karena kebanyakan masyarakat kita hingga kini masih menganut sebuah kultur yang dinamakan dengan patriarki. Sistem patriarki menempatkan laki-laki pada suatu posisi yang superior dan mengonstruksikan perempuan dalam posisi subordinat.

Dampak dari masyarakat yang berbudaya patriarki ini menimbulkan ketimpangan dalam beberapa kasus, misalnya dalam mengakses sumber daya, pengambilan keputusan, serta pembagian kerja, baik itu didalam ranah domestik maupun di ranah publik. Ketimpangan ini yang menyebabkan adanya ketertinggalan salah satu kelompok Masyarakat, terutama perempuan.

Ketimpangan gender ini sering kali berujung pada bentuk-bentuk ketidakadilan, misalnya termarginalisasikannya suatu kelompok, subordinasi, stereotip negatif, kekerasan berbasis gender, dan beban kerja ganda pada perempuan. Permasalahan utama dalam peningkatan kualitas hidup

Gender," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 3, 3043.

³⁸⁷ Gemilang Sehat. (2022). *Tentang gender dan contoh gender sebagai konstruksi sosial dalam kehidupan sehari-hari*.

perempuan terletak pada belum terintegrasinya perspektif kesetaraan gender dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan³⁸⁸.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. PUG merupakan strategi yang sistematis dan integral guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan melalui integrasi perspektif gender ke dalam suatu kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi.

B. Peladang

Istilah “peladang” dalam konteks agraria merujuk pada individu atau keluarga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas budidaya pertanian di lahan kering atau ladang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Istilah peladang merujuk kepada setiap orang atau petani yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencaharian pokok dan/atau sampingan hidupnya. Petani ladang, dibedakan menjadi 2 yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap.

Peladang biasanya mengelola lahan secara tradisional dan mengandalkan hasil panen untuk kebutuhan subsistensi maupun penjualan di pasar lokal. Pengetahuan yang digunakan oleh peladang umumnya bersumber dari kearifan

³⁸⁸ Lembaga Kajian Gender Universitas Muhammadiyah Surabaya. (2023). *Gender: Kesetaraan gender dan pemicu permasalahan*

lokal dan diwariskan secara turun-temurun³⁸⁹. Dalam praktiknya, peladang sangat bergantung pada kondisi alam, seperti curah hujan, iklim, dan kesuburan tanah. Oleh karena itu, mereka sering menggunakan pendekatan ekologis, seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik, sebagai strategi adaptif terhadap risiko lingkungan.

Keberadaan peladang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan daerah, sekaligus berkontribusi pada perekonomian lokal. Dalam konteks ini, upaya pemberdayaan peladang, khususnya perempuan peladang, menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka melalui akses terhadap pelatihan, modal, teknologi ramah lingkungan, serta perlindungan hukum.

C. Distribusi Kerja

Distribusi kerja dalam masyarakat tidak terlepas dari pembagian tugas berdasarkan peran gender yang telah dikonstruksi secara sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Murniati (2004) mengklasifikasikan pekerjaan ke dalam tiga bentuk, yaitu: (1) pekerjaan produktif yang menghasilkan pendapatan; (2) pekerjaan reproduktif yang terkait dengan pengelolaan rumah tangga; dan (3) pekerjaan sosial yang mencakup aktivitas kemasyarakatan dan politik.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian menyebutkan bahwa "Usaha Pertanian adalah bisnis di bidang pertanian, yang mencakup usaha pada simpul-simpul rantai pasok, mulai dari usaha prasarana dan sarana

³⁸⁹ Sudarsono, H. (2021). *Model pengelolaan perladangan berbasis kearifan lokal (Studi kasus masyarakat Kalimantan Tengah)*

produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil, usaha penunjang, dan/atau usaha terkait lainnya.”

Keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa mereka sama-sama memiliki suatu kapasitas, keterampilan, maupun motivasi kerja yang setara dengan laki-laki³⁹⁰. Namun, untuk mencapai kesetaraan dalam distribusi kerja, diperlukan perubahan paradigma dan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan secara penuh dan setara, termasuk dalam proses produksi, pengambilan keputusan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.

D. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga baik secara material maupun spiritual. Di Indonesia definisi Keluarga Sejahtera tercantum dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang menyebutkan bahwa “Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.”

Kualitas suatu keluarga dapat ditandai dengan melihat kondisi suatu keluarga yang dimana didalam keluarga itu mencakup aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Dengan demikian, semakin besar kontribusi ekonomi dari

³⁹⁰ Saputra, R. (2022). *Implementasi program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan*. Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 1(5), 1223–1237.

suami maupun istri, semakin tinggi pula kesejahteraan keluarga baik itu secara objektif ataupun subjektif.

Kriteria kesejahteraan keluarga ini digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kemiskinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengklasifikasikan keluarga sejahtera menjadi 5 yaitu Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (KS-III), Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)³⁹¹.

Landasan Teori

Teori Gender: Nature dan Nurture

Dalam kajian gender, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk dapat menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yakni pendekatan nature (kodrat alami) dan nurture (hasil bentukan sosial). Pemahaman terhadap kedua pendekatan ini penting dalam menganalisis distribusi kerja berdasarkan gender, termasuk dalam konteks rumah tangga peladang sayur di pedesaan.

a). Nature

Pendekatan Nature mengacu pada pandangan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat alami, biologis, atau genetik³⁹². Pendekatan nature berasumsi bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat alamiah, biologis, dan genetik. Teori ini menekankan bahwa faktor-faktor biologis seperti perbedaan hormonal, struktur otak, dan fisiologis membentuk kecenderungan perilaku dan peran sosial masing-masing gender. Sebagai contoh, pada laki-laki kadar testosteron yang lebih tinggi yang dimana itu mempengaruhi agresivitas dan dominasi, sementara estrogen pada perempuan sering diasosiasikan dengan

³⁹¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2006). *Klasifikasi tingkat keluarga sejahtera*

³⁹² Bem, S. L. (1993). *The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality*. Yale University Press.

empati dan sifat keibuan. Akibatnya, pembagian kerja sosial seperti laki-laki bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan mengasuh anak dianggap sebagai refleksi dari kodrat alamiah tersebut.

Kritik terhadap pandangan ini terlalu menyederhanakan peran gender dan cenderung mempertahankan status quo patriarki. Dalam konteks pertanian, teori ini digunakan untuk membenarkan pembagian kerja tradisional yang menempatkan laki-laki pada pekerjaan fisik berat seperti mencangkul dan membajak, sementara perempuan diposisikan dalam ranah domestik dan pekerjaan agrikultur yang bersifat ringan atau mendukung.

Pandangan ini cenderung mengukuhkan struktur patriarkal, di mana laki-laki lebih sering mendominasi posisi pengambilan keputusan, seperti ketua kelompok tani atau pemilik sah atas lahan pertanian. Serta mempertahankan ketimpangan yang merugikan perempuan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan sosial.

b). Nurture

Sebaliknya, pendekatan Nurture menekankan bahwa perbedaan gender dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, budaya, dan interaksi sosial. Teori ini berpandangan bahwa anak laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda sejak kecil melalui cara berpakaian, mainan, peran sosial, dan harapan masyarakat³⁹³. Selain itu norma sosial dan budaya membentuk identitas dan perilaku gender secara konstruksi sosial, bukan karena perbedaan biologis. Padahal dalam pendekatan ini perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama untuk menjalankan berbagai peran, tergantung bagaimana mereka dibesarkan, dilatih, dan diberi kesempatan.

Dalam konteks peladang sayur di Kabupaten Magelang, pendekatan nurture membantu menjelaskan mengapa perempuan sering terbatas perannya, bukan karena

³⁹³ Lippa, R. A. (2005). Gender, Nature, and Nurture.

ketidakmampuan, tetapi karena kurangnya akses terhadap pelatihan, informasi, dan pengambilan keputusan. Jika diberi kesempatan yang sama, perempuan terbukti mampu mengelola lahan, mengatur keuangan tani, dan berpartisipasi dalam kelembagaan tani secara setara. Teori nurture menjadi dasar penting dalam gerakan feminis dan kajian gender kritis, karena membuka ruang untuk perubahan sosial menuju kesetaraan peran.

Memahami gender sebagai produk nurture membuka peluang untuk melakukan intervensi sosial dan kebijakan guna menciptakan pembagian kerja yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu contoh penerapan pendekatan nurture dalam konteks pertanian di Kabupaten Magelang adalah melalui Program FEATI (Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information). Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dengan memberikan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian.

Dalam pelaksanaannya, Program FEATI di Kabupaten Magelang mengintegrasikan pengarusutamaan gender dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelompok tani dan pelatihan pertanian, memberikan akses yang setara bagi perempuan terhadap sumber daya pertanian, seperti benih unggul dan teknologi pertanian, dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok tani dan komunitas.³⁹⁴

Hasil dari implementasi program ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kesempatan dan akses yang setara, perempuan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan keluarga.

³⁹⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Umum Program FEATI (Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information)*. Direktorat Jenderal Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai distribusi kerja peladang sayur dalam perspektif kesetaraan gender dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kabupaten Magelang. Studi kasus dilakukan secara intensif terhadap subjek dan fenomena tertentu yang dianggap mewakili realitas sosial yang sedang diteliti³⁹⁵.

Data akan dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan di lingkungan tempat peladang sayur melakukan aktivitas bertani serta dalam konteks kehidupan rumah tangga, guna mengamati secara nyata pola pembagian kerja dan interaksi gender. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada peladang perempuan dan laki-laki, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya seperti penyuluh pertanian, untuk menggali lebih lanjut persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi³⁹⁶. Analisis dilakukan secara interaktif dan berulang hingga data dinyatakan jenuh, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dan akurat terhadap isu yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Kesetaraan Gender Peladang Sayur dalam Distribusi Kerja bagi Kesejahteraan Keluarga

Distribusi kerja dalam rumah tangga petani sayur di kawasan pedesaan, seperti di Kabupaten Magelang,

³⁹⁵ Rizal Safrudin et al. (2023), "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2, 86.

³⁹⁶ Ibid 94

merupakan cerminan dari relasi gender yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya yang bersifat turun-temurun. Pembagian peran yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas yang produktif maupun reproduktif memperlihatkan kecenderungan ketimpangan, di mana perempuan terlibat secara signifikan dalam kedua ranah namun sering kali tanpa pengakuan yang proporsional. Hal ini berdampak pada kesejahteraan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun Kesehatan.

Perempuan peladang sayur memiliki kontribusi penting dalam kegiatan produksi pertanian di ladang, mulai dari pengolahan lahan hingga pengelolaan hasil panen. Namun demikian, peran mereka sering kali dipandang sebagai bentuk “bantuan” terhadap suami, bukan sebagai subjek utama dalam produksi pertanian³⁹⁷. Akibatnya, perempuan kurang mendapatkan akses terhadap sumber daya produksi seperti lahan, modal, dan pelatihan, serta terbatas dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi ini dapat dianalisis melalui dua pendekatan teori gender, yakni teori nature dan nurture. Perspektif gender nature menjelaskan bahwasanya perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan berakar pada karakteristik biologis dan sifat alamiah masing-masing jenis kelamin. Dalam pandangan ini, perempuan dianggap memiliki kecenderungan dalam urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki lebih rasional dan cocok bekerja di ruang publik³⁹⁸. Pandangan tersebut berkontribusi pada normalisasi ketimpangan distribusi kerja yang tidak setara dalam rumah tangga tani.

³⁹⁷ Arifin, B. (2016). *Perempuan dan pertanian dalam perspektif gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

³⁹⁸ Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith

Sebaliknya, teori gender nurture memandang bahwa peran gender dibentuk melalui proses sosial, budaya, dan pendidikan yang dapat berubah sesuai dengan konteks masyarakat. Nurture menekankan bahwa ketimpangan peran bukanlah akibat dari kodrat biologis, melainkan dari proses sosialisasi yang menanamkan peran gender sejak usia dini³⁹⁹. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga maupun pertanian dapat dinegosiasikan dan dibentuk ulang untuk mencapai distribusi kerja yang lebih setara.

Kesetaraan gender dalam distribusi kerja memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap suatu sumber daya dan ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan dalam rumah tangga, seperti untuk pendidikan anak kedepannya, kesehatan, dan pangan keluarga. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan peladang sayur merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga petani secara menyeluruh.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, penting bagi kebijakan publik untuk mendorong penguatan kapasitas perempuan petani, penyediaan akses yang adil terhadap sumber daya pertanian, serta perubahan norma sosial yang membatasi peran perempuan. Distribusi kerja yang adil dan setara bukan hanya merupakan wujud keadilan sosial, tetapi juga prasyarat bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terkhususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan⁴⁰⁰.

³⁹⁹ Lorber, J. (1994). *Paradoxes of Gender*. New Haven: Yale University Press.

⁴⁰⁰ UN Women. (2017). *Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.

B. Indek Ketimpangan Gender (IKG) Sebagai Alat Ukur Ketidaksetaraan Gender di Daerah

Tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masih menjadi perhatian penting dalam upaya mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk memantau kesenjangan ini adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan politik, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin rendah nilainya, semakin kecil tingkat ketimpangan gender yang terjadi.

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sempat mengalami peningkatan ketimpangan gender, ditandai dengan kenaikan IKG dari 0,421 pada tahun 2018 menjadi 0,451 pada tahun 2022, bahkan melampaui rata-rata provinsi yang berada pada angka 0,371. Peningkatan ini mencerminkan memburuknya kondisi kesetaraan gender, terutama di masa pandemi. Namun, perkembangan positif mulai tampak pada tahun 2023, di mana IKG Kabupaten Magelang menurun secara signifikan menjadi 0,259, menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender.

Selaras dengan penurunan IKG, kemajuan ini turut didukung oleh peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang yang menunjukkan peningkatan, mencapai 92,91 pada tahun 2023. IPG mengukur pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dengan nilai mendekati 100 menunjukkan kesetaraan yang lebih tinggi. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa pembangunan antara penduduk laki-

laki dan perempuan semakin merata di Kabupaten Magelang.⁴⁰¹

Pada tahun 2023 juga, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Magelang juga mengalami peningkatan, mencapai 70,52. IDG mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peningkatan IDG ini menunjukkan bahwa peran perempuan semakin meningkat dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Magelang.

Dilihat secara keseluruhan, penurunan IKG dan peningkatan IPG serta IDG di Kabupaten Magelang menunjukkan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender, yang berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰²

C. Distribusi Kerja dan Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Petani Sayur di Kabupaten Magelang

Pertanian sayur merupakan salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian rumah tangga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebagai daerah agraris dengan potensi alam yang subur, banyak keluarga menggantungkan hidup dari aktivitas bercocok tanam, khususnya sayur-mayur. Dalam konteks pertanian keluarga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama penting, yang mana peran tersebut saling melengkapi dalam proses produksi, pengelolaan, hingga pemasaran hasil tani. Namun, dalam praktiknya, distribusi kerja antara laki-laki dan perempuan seringkali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender.

⁴⁰¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2023). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Magelang Tahun 2023*. BPS Kabupaten Magelang.

⁴⁰² Ikhwan, R et al. (2025). Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kesetaraan gender di sektor pertanian Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 22(2), 97–109.

Kesetaraan gender dalam sektor pertanian tidak hanya menyangkut pembagian tugas yang adil, tetapi juga pengakuan atas kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya produktif. Penerapan distribusi kerja yang adil berdasarkan prinsip kesetaraan gender dapat meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat kohesi keluarga, dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga petani.

Kabupaten Magelang, khususnya kecamatan-kecamatan agraris seperti Ngablak, Kaliangkrik, dan Bandongan, menjadikan sektor pertanian sayur sebagai tumpuan utama penghidupan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, diketahui bahwa mayoritas kepala keluarga petani berusia rata-rata 55 tahun, dengan rentang usia antara 25 hingga 65 tahun. Latar belakang pendidikan mereka sebagian besar terbatas hingga jenjang SMA. Kondisi ini berdampak pada rendahnya adaptabilitas terhadap inovasi pertanian dan terbatasnya partisipasi dalam program penguatan kapasitas.

Kondisi sosial-ekonomi ini menunjukkan kerentanan terhadap perubahan serta kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, termasuk dalam masalah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Data lapangan mengindikasikan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga petani sayur masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan norma gender tradisional. Kegiatan fisik seperti pembajakan dan penanaman sebagian besar masih dikerjakan oleh laki-laki, sementara perempuan cenderung terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan ketelitian seperti penyulaman, pemanenan, dan terutama dalam pemasaran.

Meskipun demikian, terdapat praktik kerja bersama dalam beberapa tahapan produksi, seperti penanaman dan penyulaman, yang menunjukkan adanya potensi kolaborasi antaranggota keluarga dalam kegiatan pertanian. Pola ini

membuka ruang untuk transformasi menuju sistem kerja berbasis kesalingan dan keadilan gender.

Hasil wawancara mendalam dengan para petani juga mengungkap bahwa perempuan memegang peran ganda dalam keluarga. Selain aktif dalam kegiatan pertanian, mereka juga memikul tanggung jawab domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak. Hal ini menyebabkan beban kerja perempuan menjadi lebih berat dibandingkan laki-laki, namun kontribusinya sering tidak tercatat atau diakui secara formal, baik dalam struktur keluarga maupun kelembagaan pertanian seperti kelompok tani.⁴⁰³

Data lapangan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan dan akses terhadap sumber daya produktif seperti pelatihan, modal, dan teknologi dalam keluarga tani sudah ada peningkatan, tetapi masih berada di bawah laki-laki. Ini menunjukkan adanya kemajuan partisipasi, namun juga menggambarkan kesenjangan struktural yang masih signifikan dalam pengakuan dan akses perempuan terhadap faktor produksi pertanian.⁴⁰⁴

Ditemukan juga bahwa rumah tangga petani yang menerapkan pola kerja kolaboratif yakni distribusi kerja bersama lebih dari 25% memiliki tingkat pendapatan dan kepuasan hidup yang 15-20% lebih tinggi dibanding rumah tangga yang masih mempertahankan pembagian kerja berbasis gender secara kaku.⁴⁰⁵ Keluarga dengan pola kerja egaliter juga menunjukkan pola komunikasi internal yang

⁴⁰³ Nurmiati, N. (2023). Perempuan dengan Peran Ganda dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani di Kelurahan Pattapang Kabupaten Gowa). *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(2).

⁴⁰⁴ Maskur, D. A. et al (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Melalui Kegiatan Tanam Kangkung Hidroponik. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 7(1).

⁴⁰⁵ Salamah, S et al (2023). Representasi Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Keluarga Petani di Desa Sei Bakut Kabupaten Kapuas. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(3), 292–298.

lebih terbuka, serta perencanaan usaha tani yang lebih partisipatif.

Temuan ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam pertanian bukan semata isu keadilan sosial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi kerja dan ketahanan ekonomi keluarga petani.⁴⁰⁶ Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan struktural dan kultural yang menghalangi terwujudnya distribusi kerja yang setara, sebagaimana teridentifikasi dalam narasi para responden.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain⁴⁰⁷:

1. Kurangnya akses terhadap pelatihan dan teknologi pertanian, yang masih didominasi oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga.
2. Norma budaya patriarkal, yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam keluarga dan komunitas, sehingga membatasi ruang gerak perempuan.
3. Minimnya representasi perempuan dalam kelembagaan pertanian, seperti kelompok tani dan koperasi.
4. Beban kerja ganda perempuan, yang menyebabkan keterbatasan waktu dan energi untuk terlibat dalam aktivitas sosial atau kelembagaan.
5. Akses terbatas terhadap modal dan aset produktif, mengingat mayoritas kepemilikan lahan masih tercatat atas nama laki-laki.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi intervensi yang bersifat struktural dan berkelanjutan, antara lain⁴⁰⁸:

⁴⁰⁶ Hasrida, H et al. (2022). Peran Gender dalam Keluarga Petani: Studi Kasus pada Keluarga Petani Jagung. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 9(1).

⁴⁰⁷ Wahyuningsih, Ika Nur. (2020). *Analisis Gender: Memahami Peran Perempuan dan Kompleksitasnya*. Surabaya: Penerbit NLF.

⁴⁰⁸ Mosse, Julia Cleves. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1. Peningkatan kapasitas perempuan petani, melalui pelatihan teknis, manajerial, dan pengelolaan usaha berbasis kelompok.
2. Pemberian akses terhadap modal mikro, khususnya bagi kelompok perempuan yang sudah aktif dalam kegiatan pertanian.
3. Sosialisasi kesetaraan gender, melalui kerja sama antara dinas pertanian, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat.
4. Penguatan kelembagaan pertanian, termasuk mendorong pendaftaran sertifikat lahan atas nama suami-istri serta peningkatan representasi perempuan dalam organisasi pertanian.

Jika strategi-strategi tersebut diimplementasikan secara konsisten, diharapkan dapat memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga petani sayur dan menciptakan sistem kerja yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dalam pembangunan pertanian di pedesaan.

D. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mewujudkan Distribusi Kerja Yang Adil Dan Setara

Distribusi kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga peladang sayur di Kabupaten Magelang masih menunjukkan ketimpangan struktural yang cukup signifikan. Meskipun perempuan terlibat secara aktif dalam berbagai tahap produksi pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga penjualan hasil panen, kontribusi mereka kerap kali tidak diakui sebagai kerja produktif, melainkan hanya sebagai “bantuan”.

Hal ini sejalan dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Judith Butler, bahwa peran dan pekerjaan perempuan sering kali dibentuk oleh norma dan harapan sosial yang membatasi peran mereka hanya pada sektor domestik atau kerja yang tidak dibayar. Dalam konteks ini, kesetaraan formal memang tampak bahwa perempuan bisa bekerja di ladang, namun

kesetaraan substantif belum tercapai karena tidak ada redistribusi kekuasaan dan pengakuan yang adil atas peran mereka.

Lebih lanjut, beban kerja ganda yang ditanggung oleh perempuan menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam pembagian peran domestik dan public. Perempuan petani menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan waktu antara aktivitas pertanian dan pekerjaan rumah tangga⁴⁰⁹. Konsep keadilan gender menuntut agar kerja domestik tidak lagi dianggap sebagai kewajiban alami perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab bersama anggota rumah tangga.

Di sisi lain, akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, dan pelatihan masih lebih dominan dikuasai oleh laki-laki⁴¹⁰. Padahal, menurut teori keadilan Rawls, akses terhadap peluang dan sumber daya harus diatur untuk memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung, yang dalam hal ini adalah perempuan petani. Ketimpangan akses ini memperkuat posisi subordinat perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, baik dalam rumah tangga maupun kelompok tani.

Ketimpangan ini berdampak pada kesejahteraan keluarga. Ketika kontribusi perempuan tidak dimaksimalkan dan tidak diakui secara setara, maka potensi ekonomi rumah tangga petani menjadi tidak optimal. Padahal, berbagai studi menyebutkan bahwa peningkatan peran perempuan dalam sektor pertanian berbanding lurus dengan peningkatan kualitas gizi keluarga, pendidikan anak, dan stabilitas ekonomi rumah tangga.

⁴⁰⁹ Sari, R. P., & Prasetyo, A. (2020). *Hambatan dalam Pemberdayaan Perempuan Petani di Kabupaten Magelang. Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 15(2), 45–58.

⁴¹⁰ Wulandari, S., & Nugroho, A. (2017). *Analisis Hambatan Sosial dan Ekonomi dalam Mewujudkan Kesetaraan Distribusi Kerja di Sektor Pertanian. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 101–114.

Namun demikian, terdapat beberapa indikasi perubahan di lapangan. Di beberapa desa, terdapat peladang perempuan yang mulai terlibat aktif dalam kelompok tani, koperasi, atau kegiatan pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bersifat dinamis, dan dapat diperkuat melalui intervensi kebijakan, edukasi gender, dan penguatan peran perempuan dalam kelembagaan lokal.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan program yang responsif gender, seperti pelatihan kewirausahaan perempuan, penguatan hak atas lahan, serta kampanye perubahan peran gender di tingkat keluarga. Dengan begitu, distribusi kerja yang adil dapat mendukung kesejahteraan keluarga secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kerja peladang sayur di Kabupaten Magelang masih menunjukkan ketimpangan struktural yang cukup signifikan. Meskipun perempuan terlibat secara aktif dalam berbagai tahap produksi pertanian, kontribusi mereka kerap kali tidak diakui sebagai kerja produktif, melainkan hanya sebagai "bantuan". Hal ini sejalan dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial, yang membatasi peran perempuan hanya pada sektor domestik atau kerja yang tidak dibayar.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pertanian bukan hanya merupakan isu keadilan sosial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi kerja dan ketahanan ekonomi keluarga petani. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan program yang responsif gender, seperti pelatihan kewirausahaan perempuan, penguatan hak

atas lahan, serta kampanye perubahan peran gender di tingkat keluarga.

Dengan demikian, distribusi kerja yang adil dapat mendukung kesejahteraan keluarga secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan peladang sayur dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga tani secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Bem, S. L. (1993). *The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality*. Yale University Press.

Lippa, R. A. (2005). *Gender, Nature, and Nurture*.

Lorber, J. (1994). *Paradoxes of Gender*. New Haven: Yale University Press.

Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*.

Mosse, Julia Cleves. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith.

Wahyuningsih dan Ika Nur. (2020). *Analisis Gender: Memahami Peran Perempuan dan Kompleksitasnya*. Surabaya: Penerbit NLF.

H, Hasrida et al. (2022). Peran Gender dalam Keluarga Petani: Studi Kasus pada Keluarga Petani Jagung. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1.

Maharani, Ivana Septia et al. (2024). "Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 5, No. 3. Hlm 3043.

Maskur, D, A et al. (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Melalui Kegiatan Tanam Kangkung Hidroponik. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, Vol. 7, No. 1.

Megantara, Fitri Suminar and Nuraini W Prasodjo. (2021). "Analisis Gender Pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Agroforestri (Kasus: Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Tengah)," *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 4. Hlm 578.

Nurmiati, N. (2023). Perempuan dengan Peran Ganda dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani di Kelurahan Pattapang Kabupaten Gowa). *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9, No. 2.

R, Ikhwan et al. (2025). Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kesetaraan gender di sektor pertanian Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 22. No. 2. Hlm 97–109.

Rizal Safrudin et al. (2023). "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2. Hlm 86.

S, Salamah et al. (2023). Representasi Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Keluarga Petani di Desa Sei Bakut Kabupaten Kapuas. *Huma: Jurnal Sosiologi*, Vol. 2, No. 3. Hlm 292–298.

Saputra, R. (2022). Implementasi program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 5. Hlm 1223–1237.

Sari, R. P., & Prasetyo, A. (2020). Hambatan dalam Pemberdayaan Perempuan Petani di Kabupaten Magelang. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2. Hlm 45–58.

Sudarsono, H. (2021). Model pengelolaan perladangan berbasis kearifan lokal (Studi kasus masyarakat Kalimantan Tengah)

Weka, Natali, et al. (2023). "Peran Usaha Tani Sayur Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Wilayah Patisomba Kelurahan Wuring Kabupaten Sikka," *Journal of Agricultural and Farming*, Vol. 1, No. 1. Hlm 11.

Wulandari, S., & Nugroho, A. (2017). Analisis Hambatan Sosial dan Ekonomi dalam Mewujudkan Kesenjangan Distribusi Kerja di Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 2. Hlm 101–114.

Yuliana. (2022). “Perempuan Peladang Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga Di Desa Samba Bakumpai,” *Journal Sosiologi*, Vol. 5, No. 1. Hlm 28.

Arifin, B. (2016). Perempuan dan pertanian dalam perspektif gender. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2006). Klasifikasi tingkat keluarga sejahtera

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2023). Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Magelang Tahun 2023. BPS Kabupaten Magelang.

FAO (2011). *The State of Food and Agriculture: Women in Agriculture. Closing the Gender Gap for Development.*

Gemilang Sehat. (2022). Tentang gender dan contoh gender sebagai konstruksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Umum Program FEATI (Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information).* Direktorat Jenderal Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Lembaga Kajian Gender Universitas Muhammadiyah Surabaya. (2023). *Gender: Kesenjangan gender dan pemicu permasalahan*

UN Women. (2017). *Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development.* New York: United Nations.

World Bank (2012). *World Development Report: Gender Equality and Development.*

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)